

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Politik Internasional merupakan salah satu topik yang populer bagi akademisi Hubungan Internasional, terutama pada era globalisasi di abad ke-21. Banyak sekali objek yang dapat dikaji dalam topik ini, salah satunya *Free Trade Agreement* (FTA). Di era globalisasi seperti saat ini, FTA menjadi wadah yang paling berdampak signifikan bagi negara-negara untuk memperluas akses pasar dan ‘meluruhkan tembok-tembok’ peraturan perdagangan yang menghambat perdagangan. Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh melalui FTA yaitu mendorong investasi dan meningkatkan aturan yang memengaruhi isu-isu seperti kekayaan intelektual, perdagangan elektronik, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Australian Government, 2019). FTA juga dapat dibentuk bersama dengan negara-negara di region tertentu, atau disebut dengan *Regional Trade Agreement* (RTA). Adanya RTA dapat mempererat kerja sama regional, serta menciptakan standarisasi dan harmonisasi regulasi di region tersebut. Beberapa contoh dari RTA yaitu *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), *European Free Trade Agreement* (EFTA), *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Secara spesifik, penelitian ini akan membahas salah satu RTA, yaitu RCEP. RCEP merupakan salah satu RTA terbesar di dunia yang berada di region Asia-

Pasifik. Ketika ditandatangani, RCEP akan menciptakan zona perdagangan bebas yang mencakup 30 persen dari produk domestik bruto, perdagangan, dan populasi yang ada di dunia. Pada 2019, akumulasi PDB dari seluruh negara anggota RCEP mencapai USD 25,84 triliun. Ini menjadikan RCEP sebagai RTA terbesar di dunia jika dibandingkan dengan dua RTA terbesar lainnya, *US-Mexico-Canada Agreement* dan *European Economic Area* yang memiliki akumulasi PDB sebesar USD 24,37 triliun dan USD 18,85 triliun (World Economic Forum, 2021). Hal ini dikarenakan RCEP dianggotai dengan sepuluh negara anggota ASEAN dan lima negara mitranya yang sudah berekonomi maju.

Pada 2011, RCEP diprakarsai oleh ASEAN untuk mengintegrasikan keenam negara mitra dari lima perjanjian ASEAN+1,<sup>1</sup> yaitu Tiongkok, India, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Pengintegrasian keenam negara mitra tersebut bertujuan untuk meleburkan peraturan perdagangan kelima perjanjian ASEAN+1 yang variatif ke dalam satu blok perjanjian perdagangan. (Abdullah, 2018). Perjanjian ini ditandatangani pada November 2020 oleh sepuluh negara anggota ASEAN—Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta lima negara mitra ASEAN+1—Tiongkok, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Jepang (Gultom, 2020). Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh seluruh anggota perundingan, terkecuali India. Pada 4 November 2019, India mengundurkan diri dari proses

---

<sup>1</sup> Free trade agreement antara ASEAN dengan masing-masing satu negara Asia Pasifik di setiap perjanjian yang dijalin. Terdapat lima perjanjian ASEAN+1, yaitu ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN-India FTA (AIFTA), ASEAN Korea FTA (AKFTA), ASEAN-Australia New Zealand (AANZFTA), dan ASEAN- Japan Economic Partnership (ACJEP).

negosiasi secara permanen pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP di Bangkok, Thailand (Dewi, 2022).

Vijay Thakur Singh, diplomat senior untuk Asia Timur di Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa alasan mundurnya India dari RCEP dikarenakan tekanan dari domestik (Dewi, 2022). Dalam kurun tahun 2015-2020, anggota RCEP rata-rata bertanggung jawab atas hampir 70 persen defisit perdagangan India dan Tiongkok merupakan negara penyumbang defisit terbesar (Erken & Every, 2020). Tiga sektor perekonomian utama India yang meliputi jasa, manufaktur, dan pertanian, serta UMKM pun masih harus menghadapi tantangan internal sehingga belum memiliki kapabilitas jika harus bersaing dengan produk asing (Lakshmanan, 2019). Tren angka pengangguran di India pun meningkat sejak 2013, hingga menyentuh angka 7,4 persen pada Desember 2018 (MS, 2019). Oleh karena itu, Modi sedang berusaha mengembangkan sektor tersebut agar meningkatkan kapabilitas untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja (Lakshmanan, 2019). Tidak hanya pemerintah yang menentang RCEP, tetapi para kelompok pebisnis, pekerja, dan petani juga turut memberikan suara mereka melalui berbagai NGO (Fangfei, 2020; Choudhury, 2019; S. Gupta & Ganguly, 2020). Apabila India menandatangani perjanjian RCEP, barang-barang asing tersebut akan memasuki pasar domestik India, kemudian mengalahkan hasil produksi lokal. Hal ini tentu saja menyerang mata pencaharian masyarakat India terutama bagi kalangan menengah ke bawah (Dewi, 2022).

Pemerintahan Narendra Modi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas mundurnya India dari negosiasi RCEP, yang mana kebijakan ini diambil pada

awal periode kedua era kepemimpinannya. Modi berasal dari partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang beraliran nasionalis Hindu dan menggunakan “Sosialisme Gandhi” sebagai ideologi utama, sehingga ajaran Hindu dianggap sebagai identitas agama dan identitas nasional India (Parshad, 2018). Visi utama Modi adalah mendorong pertumbuhan dan pembangunan bagi negara dan rakyatnya, serta melakukan reformasi di dalam negeri dan diimbangi dengan kebijakan ekonomi luar negeri yang antusias dan pro-kapitalis (Narlikar, 2022). Dalam mencapai visi tersebut, Modi telah menerapkan banyak kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan industri, petani, tenaga pekerja, dan masyarakat kurang mampu.

Dalam ekonomi politik internasional, Modi telah membuat perjanjian bilateral masing-masing dengan Mauritius, Uni Emirat Arab (UEA), dan Australia (PTI, 2024). Namun, dalam pergerakannya, India cenderung proteksionis dan skeptis terhadap perdagangan global. Terbukti pada 2019, India menjadi negara dengan tarif rata-rata tertinggi di Asia Pasifik, yaitu sebesar 17,3 persen (Shiino, 2021). Selain itu, dalam WTO pun India cenderung menggunakan strategi negosiasi distributif dengan mengancam untuk menahan isu-isu yang menguntungkan negara lain, serta berusaha mereformasi aturan di dalam rezim agar sesuai dengan kepentingan India (Narlikar, 2022) . India pun pernah menjalin kemitraan pembangunan dengan Tiongkok pada 2015 (Ministry of External Affairs, 2015). Namun, jika hubungan keduanya semakin erat, maka India akan terus bergantung dengan Tiongkok dalam produk berteknologi tinggi. Hal ini lah yang akan menghambat pembangunan sektor manufaktur dalam negeri (Erken & Every, 2020).

India merupakan salah satu negara Asia yang sangat mencintai budayanya, budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. Akibat kecintaan masyarakat India terhadap budaya lokalnya, terdapat kemungkinan bahwa para pemangku kebijakan masih memperhatikan nilai dan budaya lokal dalam pengambilan keputusan. Dibuktikan pada pidato Narendra Modi saat India mengundurkan diri dari RCEP di KTT RCEP di Bangkok yang mengatakan “*When I measure the RCEP agreement with respect to the interest of all Indians, I do not get a positive answer. Therefore, neither the Talisman of Gandhi Ji nor my own conscience permits me to join RCEP*” (Laskar, 2020). Melalui ungkapan tersebut, Modi memutuskan untuk mundur dari RCEP atas dorongan pribadi dan amanah moral dari Mahatma Gandhi. Modi merasa bahwa RCEP tidak dapat menjawab kepentingan seluruh masyarakat India.

Melalui pengalaman sejarah pada awal abad ke-20, terjadi peristiwa *Swadeshi Movement* yang mana India memboikot barang-barang dari kolonial Inggris sebagai bentuk protes atas dipecahnya wilayah Benggala. Gerakan ini diinisiasikan oleh kaum nasionalis pada 1905. Hal ini menjadi awal kebangkitan dari nilai *Swadeshi* yang merupakan ajaran dari Mahatma Gandhi (M. Goswami, 2004). Gandhi memang tidak turut andil secara langsung dalam *Swadeshi Movement* (High Commission of India, 2010). Namun, pada 1918, Gandhi memulai *Khadi Movement* agar masyarakat mulai memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi kain *khadi*<sup>2</sup> secara mandiri sebagai bagian penting dari *Swadeshi Movement*. *Khadi Movement* dinilai dapat membantu masyarakat miskin

---

<sup>2</sup> Kain Khadi berasal dari tanaman kapas yang ditanam dan dipanen oleh orang India sehari-hari (Sukkha Citta, 2022)

dikarenakan dalam produksi kain *khadi* hampir tidak membutuhkan modal (Gandhian Institutions, 2018).

Singkatnya, *Swadeshi* dapat dikatakan sebagai alternatif dari Nasionalisme Ekonomi karena mengajarkan masyarakat agar mandiri secara ekonomi dengan menekankan konsumsi produk lokal dan meminimalisir konsumsi produk asing (Ravichandran, 2015). Dalam *Swadeshi*, kemandirian ekonomi harus diupayakan oleh seluruh *stakeholders*—tanpa terkecuali—yang ada di dalam suatu ruang lingkup tertentu untuk membangun dan mengembangkan industri lokal. Apabila kualitas industri lokal di ruang lingkup tersebut sudah mumpuni, maka *stakeholders* di dalamnya tidak perlu melakukan permintaan kepada bangsa asing di luar ruang lingkup mereka, atau dapat dikatakan mereka sudah merdeka dari ketergantungan produk asing (Dogra, 2015). Walaupun *Swadeshi* sempat meredup akibat restrukturisasi ekonomi pada 1991—yang mengubah arah sistem perekonomian menjadi lebih kapitalis, pada akhirnya BJP berhasil mengadaptasi *Swadeshi* dengan globalisasi (Arulanantham, 2004).

Melihat fenomena tersebut, hal ini menarik untuk diteliti karena adanya ideologi “Sosialisme Gandhi” dari BJP yang melandasi praktik ekonomi politik India di bawah pemerintahan Narendra Modi, baik ekonomi politik internasional, maupun ekonomi politik domestik. Keputusan India untuk mengundurkan diri dari negosiasi RCEP menjadi urgensi tersendiri bagi penulis untuk mengkaji sejauh mana ideologi “Sosialisme Gandhi” dan *Swadeshi* memengaruhi kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Modi. Mengingat RCEP merupakan RTA terbesar di dunia, seharusnya India dapat meningkatkan potensinya di kancah

internasional. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara faktor ideologis, politik domestik, dan ekonomi internasional, serta bagaimana dinamika ini dapat memengaruhi keputusan strategis dalam arena perdagangan global.

## **1.2. Rumusan Masalah**

**“Bagaimana *Swadeshi* diimplementasikan ketika menghadapi permasalahan ekonomi politik India dalam studi kasus mundurnya India diri dari negosiasi RCEP?”**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum yang memberikan gambaran dari fenomena dan tujuan khusus yang berusaha menganalisis fenomena yang telah digambarkan.

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang *Swadeshi* sebagai Budaya Strategis India. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan kondisi India dalam keanggotaan RCEP hingga faktor mundurnya India dari negosiasi RCEP baik dari dinamika selama bernegosiasi, maupun tekanan dari domestik.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana *Swadeshi* sebagai ideologi nasionalis alternatif India berperan dalam memengaruhi

desain strategis pengambilan kebijakan mundurnya India dari negosiasi RCEP. Oleh karena itu, penulis akan mengupasnya dengan kerangka teori Budaya Strategis dari Johnston untuk memperdalam hasil analisis peran identitas budaya dalam proses penyusunan kebijakan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis yang memberikan sumbangsih secara ide atau gagasan dan manfaat praktis yang memberikan sumbangsih secara konkret atau nyata.

##### ***1.4.1. Manfaat Akademis***

Penelitian ini diharapkan dapat membuka perspektif baru mengenai pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dengan sudut pandang Budaya Strategis. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pedoman sebagai referensi baru mengenai kasus mundurnya India dari RCEP dengan sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan penelitian sebelumnya.

##### ***1.4.2. Manfaat Praktis***

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi negara-negara untuk mengimplementasikan kebijakan yang berdasar kepada identitas budaya di suatu negara.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Penelitian ini menggunakan acuan dari beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama, tetapi dengan sudut pandang atau kerangka pemikiran



yang berbeda. Berbeda kerangka pemikiran, artinya berbeda pula variabel yang diangkat. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari kelemahan yang harus diperbaiki dari setiap penelitian terdahulu. Namun, penelitian ini akan mengutip beberapa unsur dari variabel-variabel yang ada, baik data maupun argumen sebagai referensi penunjang.

Literatur acuan pertama yaitu artikel jurnal yang berjudul *Dinamika Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri: Mundurnya India dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* oleh Noudy Naufal dan Shofwan Al-Banna (2021). Artikel ini dikaji menggunakan analisis politik domestik dalam kebijakan luar negeri menurut Thomas Risse-Kappen yang menganggap bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara sangat bergantung pada kondisi politik domestiknya. Penelitian ini memfokuskan pada salah satu faktor politik domestik yaitu proses *coalition-building* yang menciptakan hubungan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Dalam proses *coalition-building*, terdapat tiga golongan utama. Pertama, *state-dominated* yang terjadi di suatu negara dengan sistem pemerintahan terpusat dan opini publik yang terpecah belah, serta organisasi masyarakat yang tidak begitu memiliki pengaruh. Kedua, *societal control* yang terjadi di negara dengan masyarakat yang homogen tetapi memiliki institusi yang lemah. Ketiga, *democratic corporatism*, yang mana institusi dan masyarakat memiliki kekuatan yang seimbang sehingga dapat memutuskan kebijakan yang merefleksikan titik denominasi utama dari opini publik secara umum. Industri besi dan baja merupakan salah satu sektor yang krusial bagi ekonomi India. Namun, dikarenakan India terlibat dengan pelbagai FTA, impor besi dan baja dari Asia

Timur pun membeludak. Hal ini menyebabkan kekhawatiran dari *Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry* (FICCI) yang mendorong agar menaikkan cukai impor baja dari 10% dan 15% menjadi 25%. Hal ini pun turut dirasakan oleh pemangku kebijakan India yang ingin membatasi impor bahan tambang yang hanya sekadar bahan baku produksi saja (Naufal & Choiruzzad, 2021).

Literatur yang kedua, yaitu artikel jurnal yang berjudul *Motivasi India Mengundurkan diri dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Tahun 2019* oleh Ika Annisa Putri (2021). Artikel ini dikaji menggunakan sudut pandang Modinomics dan populisme Modi. Modinomics adalah kebijakan yang dikerahkan oleh Narendra Modi di tahun 2014 yang merupakan fase awal beliau menjabat sebagai perdana menteri India. Kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan India agar kembali ke lintasan pertumbuhan ekonomi tinggi yang pernah diraih pada tahun 2000-an. Untuk mengimplementasikan Modinomics, Modi menggunakan strategi populisme agar kembali mendapatkan simpati dari rakyatnya. Narendra Modi fokus untuk mengedepankan kepentingan rakyatnya yang keberatan atas bergabungnya India ke dalam negosiasi RCEP. Hal ini dikarenakan khawatir akan merugikan beberapa sektor penting di India seperti pertanian dan manufaktur. Sehingga, Modi ingin memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dalam negeri terlebih dahulu (Putriani, 2021).

Dengan menggunakan kaca mata nasionalisme ekonomi pun dapat disimpulkan bahwa Narendra Modi menggunakan sistem proteksionisme dalam hal kebijakan ekonomi politik. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan lonjakan

barang impor terutama dari Tiongkok. Walaupun memiliki kualitas yang rendah, barang Tiongkok jauh lebih murah daripada barang India tetap mampu bersaing di pasar domestik India. Bharatiya Janata Party (BJP) yang merupakan partai asal Narendra Modi pun sangat mengamalkan *Swadeshi* atau “nasionalisme ekonomi” yang memprioritaskan aspek-aspek dari dalam negeri. *Swadeshi* pun akhirnya pun menjadi proyeksi kekuatan India dan identik dengan globalisasi (Putriani, 2021).

Literatur ketiga yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu artikel jurnal yang berjudul *India's Withdrawal from Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) oleh Abraham Hugo Pandu Wicaksono (2021). Artikel tersebut menggunakan teori Realisme Neoklasik yang fokus terhadap aspek bahwa sistem internasional adalah anarki dan faktor domestik. Dengan menggunakan teori tersebut, dijelaskan bahwa terdapat kesenjangan normatif yang mana India di bawah Narendra Modi cenderung bertentangan dengan *look east principle* yang menuntut agar India aktif di kancah internasional. Selain itu, India juga menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Artikel ini menjelaskan bahwa mundurnya India dari RCEP dipengaruhi oleh dua faktor: perubahan struktur regional dan tekanan dari domestik. Perubahan struktur regional disebabkan oleh Tiongkok yang berupaya untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat melalui RCEP yang mewakili Indo-Pasifik. Namun, upaya Tiongkok tersebut justru menjadi ancaman bagi India. Kedua, tekanan domestik dari partai INC dan Swadish Jargan Manch menganggap bahwa RCEP dapat mengancam industri domestik seperti manufaktur dan agrikultur. Kedua faktor tersebut melahirkan inkonsistensi Narendra Modi yang awalnya ingin meningkatkan

eksistensinya di Indo-Pasifik, tetapi secara mengejutkan berakhir dengan meninggalkan RCEP pada 2019 (Wicaksono, 2021)

Sejauh ini, belum ada penelitian yang menggunakan *Strategic Culture* sebagai pisau analisis dalam membedah kasus ini. Kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang kondisi politik domestik dan ekonomi politik internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan aspek kebaruan dengan menggunakan pisau analisis dari Teori *Strategic Culture* yang merujuk pada salah satu identitas budaya yang berasal dari filsafat Mahatma Gandhi, yaitu *Swadeshi*.

### **1.5.1. *Strategic Culture***

Singkatnya, *Strategic Culture* adalah sistem simbol yang terintegrasi—misalnya struktur argumentasi, bahasa, analogi, metafora—yang bertindak untuk menerapkan preferensi strategis yang mengakar di dalam masyarakat dengan memformulasikan konsep peran dan efektivitas kekuatan dalam urusan politik luar negeri. Konsep tersebut dibungkus dengan nuansa faktualitas sehingga preferensi strategis tersebut tampak unik, realistis, dan efektif (Johnston, 1995).

Clifford Geertz (1973) dalam karyanya yang berjudul *The Interpretation of Cultures* mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem konsepsi yang diwariskan dan diungkapkan dalam bentuk simbolik. Melalui budaya tersebut, manusia berkomunikasi serta mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan. Budaya terbentuk dari proses historis yang sangat panjang hingga nilai-nilainya tertanam kokoh di kehidupan bermasyarakat. Sehingga *Strategic Culture* merupakan konsep yang mengkaji tindakan suatu negara berdasarkan pengalaman sejarah suatu negara yang membentuk suatu budaya. Hingga kemudian

terimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pola pikir para pemangku kebijakan (Johnston, 1995).

Dengan meminjam definisi dari ilmu Antropologi, kebudayaan atau budaya adalah “keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.” Oleh karena itu, seluruh tindakan manusia merupakan representasi dari “kebudayaan”, karena hampir seluruh kebiasaan manusia berasal dari proses belajar (Koentjaraningrat, 2009). Begitupun pendefinisian budaya politik yang tidak melupakan definisi umum dari budaya. Budaya politik dapat didefinisikan sebagai suatu nilai yang memengaruhi tatanan dalam lingkungan politik. Budaya politik tertanam dalam pola pikir pemangku kebijakan sehingga dapat membatasi opsi pilihan keputusan yang dapat diambil, bahkan untuk solusi yang paling logis sekalipun. Lebih lanjut, budaya politik juga dapat mengeliminasi institusi, ideologi, atau perilaku alternatif dari lingkungan politik. Baik di dalam definisi budaya maupun budaya politik, keduanya percaya bahwa budaya dianut secara kolektif dan mengandung aturan yang mendoktrin cara masyarakat bersosialisasi (Johnston, 1995).

Perlu diketahui, pola budaya dan pola perilaku bukanlah hal yang sama karena pola budaya merupakan variabel independen. Sementara pola perilaku merupakan variabel dependen yang memiliki hubungan kausalitas dengan pola budaya. Dengan adanya pola budaya, akan membatasi pilihan keputusan dan memengaruhi cara masyarakat berperilaku. Kriteria budaya strategis yang berhasil memengaruhi perilaku yaitu terbatasnya opsi keputusan yang dapat diambil.

Kemudian, peneliti harus menelusuri sumbernya, menelusuri proses sosialisasi penyebarannya, dan melihat nilai-nilai dan asumsi yang dianut oleh aktor kunci pembuat kebijakan (Johnston, 1995).

*Strategic Culture* tidak terbatas hanya untuk mengkaji tentang kekuatan militer saja. Pada intinya, *Strategic Culture* lebih menjelaskan terbentuknya *strategic behavior* dari budaya yang ada di suatu negara dalam menghadapi kondisi yang strategis bagi negara tersebut (Johnston, 1995). Klein (1991) dalam Maula Hudaya menjelaskan bahwa situasi strategis merujuk kepada situasi yang dapat dimanfaatkan negara untuk mencapai suatu tujuan atau disebut sebagai “*goal oriented activity*”. Dalam mencapai tujuan tersebut, budaya strategis berperan sebagai kepercayaan yang dianut dalam proses mencapai tujuan tersebut (Hudaya, 2022).

Lebih lanjut, Johnston menawarkan metode analisis untuk menganalisis budaya strategis yang terdiri dari pemetaan kognitif dan analisis simbol. Dari kedua metode tersebut, peneliti dapat mengungkap hubungan kausalitas antara pola budaya dengan pola perilaku.

1. Pemetaan Kognitif merupakan metode yang menafsirkan struktur wacana atau dokumen resmi yang dipublikasikan seorang aktor negara. Publikasi tersebut dapat berupa pidato, dokumen kebijakan, atau *report* yang dipublikasikan secara resmi oleh suatu lembaga negara. Kemudian, makna filosofis budaya dari kandungan isinya akan diidentifikasi.
2. Analisis Simbol merupakan metode yang menguji berbagai elemen seperti makna yang ada di dalam simbol, akar historis, dan perkembangannya.

Simbol dianggap sebagai alat untuk mengkomunikasikan suatu budaya, sehingga menjadi landasan dari diambilnya keputusan yang diwujudkan secara empiris.

Wacana resmi tersebut merupakan perwujudan dari pola perilaku negara, sementara simbol-simbol dapat menjadi validasi yang kuat dari hadirnya budaya tersebut di suatu negara. Setelah memastikan pemaknaan filosofis budaya yang terkandung, identifikasi lebih lanjut mengenai pengaruhnya dalam tindakan negara, termasuk dalam desain strategis pengambilan kebijakan dapat dilakukan (Johnston, 1995).

#### ***1.5.2. Swadeshi: the Gandhian philosophy***

Dalam proses analisis kebijakan mundurnya India dari negosiasi RCEP, *Swadeshi* akan difungsikan sebagai variabel pola budaya dalam teori *Strategic Culture*. Sehingga, pada proses analisisnya, nilai *Swadeshi* akan dijadikan sebagai acuan dalam memandang perilaku negara. Baik dalam metode Pemetaan Kognitif, maupun Analisis Simbol, seluruh elemen terkait seperti wacana resmi atau simbol-simbol yang menjadi dugaan akan dikaji keterkaitannya dengan nilai *Swadeshi*.

*Swadeshi* merupakan salah satu pemikiran Mahatma Gandhi yang populer di India, terutama dalam memandang isu ekonomi. Gandhi sendiri tidak pernah menciptakan sebuah literatur yang bertajuk “*Gandhian Economic*” ataupun mengaku sebagai ekonom dan menempuh pendidikan di bidang Ilmu Ekonomi. Secara umum, *Swadeshi* didefinisikan sebagai tindakan untuk menggunakan semua produk buatan dalam negeri, serta mengesampingkan produk asing, sejauh penggunaan tersebut diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama

industri-industri yang tanpanya India akan mengalami kemunduran (Ravichandran, 2015). Apabila bangsa India dan para pemimpinnya tulus mengamalkan *Swadeshi*, maka ajaran Gandhi untuk memprioritaskan konsumsi produk lokal harus dimasukkan ke dalam agenda kepentingan nasional (Dogra, 2015).

Gandhi menggambarkan *Swadeshi* sebagai ‘hukum dari segala hukum’ yang tertanam secara spiritual di dalam sifat manusia. Hukum ini merupakan hukum alam yang dibiarkan berjalan dengan sendirinya<sup>3</sup>. Pada umumnya, nilai spiritual selalu mengajarkan untuk membebaskan jiwa dari belenggu nafsu duniawi dengan cara ‘berbaur’ dengan seluruh elemen di alam semesta. Dalam *Swadeshi*, metode spiritualisme yang dilakukan adalah dengan mengabdikan khususnya kepada orang terdekat—dalam *Swadeshi*, tidak ada perbedaan antara diri sendiri dan orang lain. Apabila individu masuk ke dalam godaan nafsu duniawi dan meninggalkan tanggung jawab atas orang terdekatnya, maka hal tersebut telah melanggar *Swadeshi* (Joseph, 2014).

*Swadeshi* merupakan pandangan alternatif yang berbeda dengan kapitalisme karena menolak eksploitasi, ataupun sosialisme karena mendukung industrialisasi. Visi ekonomi Gandhi ditujukan untuk menghapus eksploitasi dan kesenjangan ekonomi. Gandhi mengonseptualisasikan ide-ide seperti kerja sama, pengabdian, partisipasi universal dalam sektor ekonomi tradisional, pembatasan keinginan secara sukarela, desentralisasi kegiatan ekonomi, *Swadeshi* yang adaptif

---

<sup>3</sup> Jika seseorang melanggar atau tidak mengikuti hukum *Swadeshi*, baik disengaja ataupun tidak, maka hukum tersebut akan bergerak mengembalikan diri ke posisi semula, selayaknya hukum alam.



terhadap perkembangan zaman, serta transformasi kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik (Ravichandran, 2015).

Sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan menurut Gandhi adalah yang berbasis moral dan keadilan sosial. Gandhi tidak bermaksud menentang pasar, industri, dan ekspor-impor. Namun, beliau tidak menginginkan adanya praktik ekonomi yang menghasilkan pengangguran skala besar, ketidaksetaraan ekonomi, dan pengucilan sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi Gandhi bermuara pada sebuah perintah sederhana agar tidak menganjurkan kebijakan yang mengarah pada kemajuan material dengan mengorbankan pemiskinan sosial, moral, dan spiritual. Bagi Gandhi, ekonomi hanya berarti jika mengarah pada visi *Sarvodaya*, atau membuka potensi kesejahteraan bagi seluruh umat. Hal ini membutuhkan sebuah sistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan esensial dari orang-orang yang berkekurangan. Dalam mencapai *Sarvodaya*, maka harus dimulai dari sektor ekonomi tradisional di pedesaan (Ravichandran, 2015).

Untuk mencapai *Sarvodaya*, filosofi ekonomi Gandhi sangat erat dengan pembangunan desa yang universal dan demokratis. Beliau mengatakan bahwa ‘jantung’ kehidupan India berasal dari pedesaan dengan sektor ekonomi tradisionalnya.<sup>4</sup> *Swadeshi* bertujuan agar apa pun yang diproduksi di desa harus dikonsumsi pertama kali oleh anggota desa itu sendiri, sehingga diharapkan setiap desa harus membangun basis ekonomi yang kuat untuk memenuhi sebagian besar

---

<sup>4</sup> India pada saat itu sangat mengandalkan sektor ekonomi tradisional seperti pertanian, hortikultura, tekstil, gerabah, serta kerajinan tangan.

kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan vokasional pada lingkup pedesaan, sehingga penduduk desa tidak perlu bermigrasi ke perkotaan. Dengan demikian, penduduk desa tidak akan merasakan *culture shock* dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Gandhi percaya dengan melakukan produksi massal di setiap desa, maka akan meningkatkan martabat para pekerja tradisional (Ravichandran, 2015).

*Swadeshi* mengacu kepada konsep *trusteeship* yang menolak kepemilikan pribadi dan mendukung kepemilikan publik demi menjaga hati nurani kaum tertindas. Kepemilikan pribadi secara berlebihan akan memperlebar jurang kesenjangan dan menghambat ekonomi yang berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan redistribusi kekayaan material dengan cara: 1) produksi harus diputuskan berdasarkan permintaan, bukan dorongan pribadi; 2) seseorang tidak dapat menyimpan dan menggunakan kekayaannya untuk keegoisan pribadi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat; 3) hak milik pribadi tidak bersifat mutlak, tetapi tunduk pada kepentingan umum; 4) variasi dalam pendapatan harus masuk akal, adil, dan bervariasi dari waktu ke waktu dengan kecenderungan untuk mengurangi perbedaan. Gandhi menganggap dalam kehidupan, manusia tidak boleh bergantung pada pelipatgandaan kepemilikan, tetapi harus mengurangi keinginan hawa nafsu (Ravichandran, 2015).

Lebih lanjut, terdapat penentangan terhadap konsep globalisasi, sebagaimana beliau juga menentang sentralisasi ekonomi yang merujuk pada eksklusivitas sektor industri. *Swadeshi* mencegah ketergantungan ekonomi pada kekuatan pasar internasional yang dapat membuat masyarakat desa menjadi tidak

‘aman’ dan ‘nyaman’. Gandhi menganggap globalisasi dan pasar bebas dapat meningkatkan ‘hawa nafsu’ masyarakat karena dorongan untuk bekerja lebih keras demi mengejar keuntungan materialis. Adanya globalisasi ekonomi akan meningkatkan ‘gairah’ bagi negara-negara untuk memperoleh keuntungan dengan mengekspor lebih banyak dan mengimpor lebih sedikit. Hal ini dianggap sebagai kegiatan pengejaran nafsu duniawi yang dapat menimbulkan stres, hilangnya ketenangan batin, hilangnya hubungan kekeluargaan, serta hilangnya kehidupan spiritual (Ravichandran, 2015).

Gandhi percaya bahwa kemiskinan yang melanda masyarakat disebabkan oleh penyimpangan dari hukum *Swadeshi* dalam kehidupan ekonomi dan industri. Untuk memperbaikinya, masyarakat harus kembali ke spiritualisme *Swadeshi* dengan melakukan “pelayanan masyarakat sekitar” dengan menggunakan barang-barang yang diproduksi oleh mereka. Pelayanan ini dilakukan hingga menciptakan hubungan organik antara produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga mempertahankan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui *Swadeshi*, akan terjadi pertukaran produk yang sehat, bukan persaingan yang ketat melalui permainan kekuatan pasar (Joseph, 2014). Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat tujuh kriteria yang menjadi ciri kemandirian ekonomi menurut Gandhi:

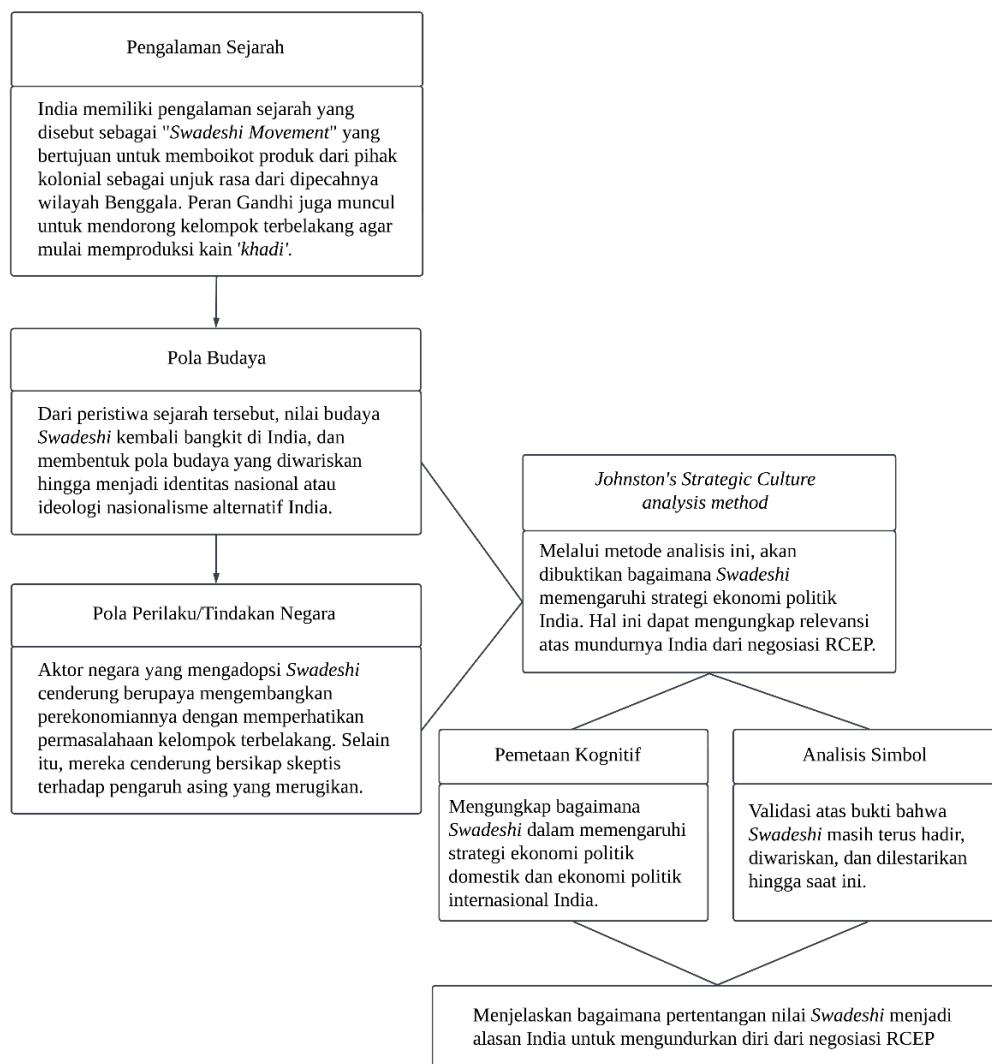
1. Pertanian yang menghormati lingkungan sebagai dasar bagi terciptanya ekonomi yang berkelanjutan;
2. Penghapusan kemiskinan dan pemerataan kekayaan;
3. Produksi yang sebisa mungkin bertumpu pada kelompok-kelompok kecil;
4. Swasembada setiap unit dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;

5. Identifikasi kebutuhan dasar manusia dan cara untuk memenuhinya yang merujuk pada visi *Sarvodaya*;
6. Pengendalian dan penghapusan pandangan-pandangan yang menyimpang melalui pendidikan vokasional; dan
7. Mengurangi konsentrasi atas kekuatan ekonomi berdasarkan prinsip *trusteeship* (Ravichandran, 2015).

Apabila India ingin menerapkan kebijakan pembatasan perdagangan, maka kebijakan tersebut harus diambil dengan motivasi untuk melindungi produk tertentu yang sudah berhasil diproduksi oleh produsen lokal, bukan karena paksaan sepihak. Dengan kata lain, *Swadeshi* yang sejati harus didasarkan pada kesadaran dan komitmen sukarela dari seluruh rakyat, bukan melalui aturan atau paksaan pemerintah (Dogra, 2015).

### **1.5.3. Bagan alur berpikir**

Gambar 1.1 berikut merupakan *guide* untuk membantu pembaca untuk memahami alur berpikir tulisan ini. *Swadeshi* yang menjadi pola budaya merupakan perwujudan dari variabel independen, sementara tindakan negara yang memprioritaskan pengembangan ekonomi negara dan meminimalisir pengaruh asing merupakan variabel terikat. Metode analisis *Strategic Culture* milik Johnston merupakan indikator untuk mengungkap bagaimana kedua variabel saling memengaruhi. Melalui metode tersebut akan dijelaskan bahwa pertentangan nilai *Swadeshi* sebagai alasan India untuk mengundurkan diri dari negosiasi RCEP.



**Gambar 1.1** Alur berpikir analisis *Strategic Culture* dalam kajian kebijakan mundurnya India dari negosiasi RCEP  
*Sumber: olah data oleh penulis (2024)*

### 1.6. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat konsep-konsep yang diturunkan dari kerangka pemikiran. Terdapat tiga konsep yang dioperasionalkan ke dalam studi kasus ini, yaitu Etnosimbolisme, *Second-image*, dan *Self-reliant Economy*. Definisi dari ketiga konsep tersebut akan dipaparkan dalam “*Definisi konseptual*”,

sementara implementasinya di dalam fenomena akan dipaparkan dalam “*Definisi operasional*”.

### **1.6.1. Definisi konseptual**

Definisi konseptual adalah deskripsi dari konsep-konsep yang diturunkan dari kerangka pemikiran. Pendefinisian dari konsep-konsep tersebut tidak harus mengacu pada pencetus dari kerangka teori yang diaplikasikan pada penelitian.

#### **1. Etnosimbolisme**

Etnosimbolisme adalah konsep yang menjelaskan bahwa mitos, simbol, memori sejarah, dan tradisi etnis merupakan faktor penting dalam pembentukan identitas nasional. Hal ini berbeda dengan pemikiran modernisme yang menganggap bahwa Nasionalisme hanya sekadar produk modernisasi, industrialisasi, dan institusi negara. Nasionalisme bukan sekadar konstruksi politik modern, melainkan kelanjutan dari solidaritas etnis yang sudah ada sebelumnya dan berakar dalam memori sejarah yang panjang (Smith, 1998:170-198).

#### **2. *Self-reliant economy***

*Self-reliant Economy* dalam konteks filsafat Mahatma Gandhi adalah sebuah visi untuk mencapai kemerdekaan ekonomi yang bertumpu pada produksi dalam negeri dan swasembada. Jika dideskripsikan lebih luas, *Self-reliant economy* Gandhi juga mencakup desentralisasi ekonomi untuk memberdayakan kelompok terbelakang agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada kekuatan dari luar. Oleh karena itu, visi ini sangat memperhatikan moralitas dalam melawan eksploitasi kapitalisme

industri yang merendahkan martabat manusia dan merusak tatanan sosial. Dengan memperhatikan moralitas, nantinya akan tercipta distribusi sumber daya yang adil, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan komunitas dan martabat tenaga kerja. Gagasan-gagasan ini tetap relevan untuk wacana kontemporer seputar pembangunan berkelanjutan, yang menegaskan perlunya solusi lokal dalam dunia yang mengglobal (Chahal, 2024).

### **3. *Second-image***

*Second-Image* adalah konsep yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri harus menyesuaikan konteks kondisi dan permasalahan yang ada di dalam negeri. Pengambilan kebijakan luar negeri harus memperhatikan struktur politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan tekanan dari berbagai aktor domestik yang ada di dalam suatu negara. Konsep ini menyoroti interaksi dinamis antara faktor domestik dan kebijakan luar negeri, yang mana kebijakan luar negeri dapat memperkuat atau melemahkan kekuatan domestik, dan sebaliknya (Waltz, 1959).

#### **1.6.2. *Definisi operasional***

Definisi operasional adalah bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan ke dalam fenomena yang ada. Dalam mendefinisikannya, tentu saja harus menyesuaikan definisi konseptual yang ada.

#### **1. Etnosimbolisme**

Dalam penelitian ini, konsepsi Etnosimbolisme membantu menjelaskan bahwa struktur Nasionalisme ekonomi di India berasal dari *Swadeshi*. *Swadeshi*

mulai menjadi identitas nasional India dikarenakan peristiwa *Swadeshi Movement* pada masa penjajahan yang diinisiasikan oleh kelompok ekstremis nasionalis (Tasneem, 2015). Semangat nasionalis dibangun dengan cara memboikot segala pengaruh asing dan mempromosikan “*khadi*” (Sukkha Citta, 2022). Oleh karena itu, peristiwa tersebut memberikan pelajaran untuk skeptis terhadap pihak asing yang berpotensi merugikan dan setia terhadap segala sesuatu yang diproduksi oleh bangsa India (Narlikar, 2022). *Swadeshi* bukan hanya gerakan ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan kebanggaan etnis yang membedakan India dari bangsa Barat (H. Mukherjee & Mukherjee, 1958). Ideologi tersebut dapat dikatakan sebagai alternatif karena keunikannya yang berbeda dari Kapitalisme milik Barat karena *Swadeshi* menolak eksploitasi, serta Komunisme milik Timur karena *Swadeshi* masih mendukung industrialisasi (Ravichandran, 2015). Oleh karena itu, *Swadeshi* menjadi ideologi nasionalisme alternatif yang tidak hanya memandang kepentingan material semata dan institusi negara, tetapi juga berasal dari memori sejarah dan pergerakan kelompok-kelompok nasionalis di India.

*Swadeshi* pun diadopsi oleh Bharatiya Janata Party sebagai ideologi Sosialisme Gandhi, yang kemudian terus dibangkitkan oleh Narendra Modi ketika menjabat sebagai perdana menteri dengan membentuk pemerintahan berbasis identitas etnis dan simbolik (Seshia, 1998). Dalam konteks penelitian ini, Modi mengglorifikasikan simbol-simbol yang diwariskan dari seluruh rangkaian memori sejarah perjuangan *Swadeshi* seperti *Charka*, *Khadi*, majalah “*Swadeshi Patrika*”, dan menciptakan merek “*India Handloom*”. Walaupun



simbol-simbol tersebut terkesan ‘pasif’ dalam memberikan pengaruh, tetapi perlu ditegaskan bahwa hal ini juga diikuti oleh tindakan Modi dalam mempraktikkan *Swadeshi* ke dalam strategi kebijakan ekonomi politiknya untuk menuju perekonomian yang mandiri.

## **2. *Self-reliant economy***

*Self-reliant economy* merupakan visi yang diimplementasikan oleh pemerintahan Modi dalam memperbaiki industri dalam negeri dan mencegah kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa India berupaya mencapainya dengan cara mendorong produksi lokal terutama sektor-sektor utama seperti jasa, pertanian, manufaktur, dan UMKM, serta mengatasi pengangguran. India lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dengan menerapkan desentralisasi ekonomi yang memberdayakan kelompok terbelakang agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Upaya ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan meminimalisir angka pengangguran. Untuk membantu mendorong upayanya, Modi juga menyerukan kepada publik untuk mengonsumsi hasil-hasil produksi mereka agar menciptakan siklus perekonomian yang sehat, organik, dan berkelanjutan. Untuk menghindari gagalnya siklus tersebut, Modi sangat proaktif untuk meminimalisir pengaruh asing yang berpotensi memberikan kerugian, terutama bagi kelompok terbelakang.

## **3. *Second-image***

Dalam penelitian ini, konsepsi *Second-image* diaplikasikan untuk menjelaskan bahwa desain strategis ekonomi politik internasional India harus

menyesuaikan desain strategis ekonomi politik domestik yang berbasis *Swadeshi*. India masih harus menghadapi tantangan perekonomian domestik seperti sektor jasa yang belum maksimal dalam penyerapan tenaga kerja, para petani yang belum cukup tereduksi dalam meningkatkan produktivitasnya, “*Make in India*” yang belum stabil dalam mengembangkan sektor manufaktur, sektor UMKM yang masih harus menghadapi permasalahan mayor, dan angka pengangguran yang terus meningkat sejak 2018 (Lakshmanan, 2019; R. M. Singh, 2017; Fangfei, 2020; P. K. Gupta, 2023; MS, 2019). Dalam memecahkan permasalahan domestik tersebut, pemerintahan Modi pun mengaplikasikan *Swadeshi* pada kebijakan-kebijakannya.

Untuk menghindari penghalang dari eksternal, maka India juga menyesuaikan strategi ekonomi politik internasionalnya dengan kepentingan dalam negeri yang berbasis *Swadeshi*. Dikarenakan ajaran *Swadeshi* yang cenderung menerapkan skeptisisme terhadap pihak asing, India menganggap bahwa pengaruh eksternal adalah sebuah penghalang. Sehingga strategi ekonomi politik internasional yang diterapkan India cenderung mengarah ke proteksionisme (Shiino, 2021). Jika India tidak membatasi pengaruh asing, maka hal tersebut akan semakin menghambat kebijakan pengembangan ekonomi yang sedang diimplementasikan.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Mundurinya India dari negosiasi RCEP tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, seperti defisit perdagangan yang tinggi dengan

Tiongkok dan tantangan daya saing sektor domestik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ideologi nasional yang diusung pemerintahan Narendra Modi, yaitu *Swadeshi* dalam "Sosialisme Gandhi." Nilai *Swadeshi* yang menekankan pada kemandirian ekonomi dan keberpihakan pada produk lokal berperan penting dalam membentuk strategi ekonomi politik India. Dengan demikian, keputusan India untuk tidak bergabung dengan RCEP merupakan manifestasi dari upaya mempertahankan kemandirian ekonomi domestik dan menghindari ketergantungan pada produk asing, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif. Argumen ini menunjukkan bahwa ideologi domestik dapat secara signifikan membatasi keterlibatan sebuah negara dalam rezim perdagangan global meskipun secara ekonomi negara tersebut dapat diuntungkan dari perjanjian seperti RCEP.

## **1.8. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan data non-numerik dalam memahami suatu fenomena. Data-data yang dikumpulkan dapat berasal dari teks, video, atau audio baik berupa data primer, maupun sekunder. Metode penelitian kualitatif sangat lazim digunakan dalam rumpun studi sosial humaniora seperti Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional (Bhandari, 2020). Oleh karena itu, akan disajikan data-data non-numerik dalam mengkaji kebijakan mundurnya India dari negosiasi RCEP.

### **1.8.1. Tipe penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena tertentu secara faktual, tanpa melakukan eksperimen atau

modifikasi kondisi. Metode ini fokus pada pencatatan, analisis, dan interpretasi fakta-fakta yang ada dalam fenomena (Whitney, 1960). Melalui penelitian ini, fenomena akan diidentifikasi dan dijelaskan secara mendetail tanpa berusaha menguji hipotesis atau mencari hubungan kausalitas (Sugiyono, 2010).

Bila dielaborasi dengan penelitian ini, maka sebab dari pengambilan kebijakan mundurnya India dari negosiasi RCEP yaitu nilai *Swadeshi* yang sudah dianut oleh masyarakat India sejak zaman kolonialisme Inggris. Nilai tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam desain strategis ekonomi politik India yang mengakibatkan India memutuskan untuk mundur dari negosiasi RCEP. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji nilai *Swadeshi* sebagai variabel independen. Kemudian, penulis akan mengkaji kondisi ekonomi politik India di masa pasca reformasi 1991 sebagai variabel terikat untuk mengetahui apakah masih ada pengaruh *Swadeshi* dalam pengambilan kebijakan ekonomi politik internasional India, salah satunya kebijakan mundurnya India dari RCEP.

### **1.8.2. *Situs penelitian***

Penelitian ini dilakukan tanpa adanya penerjunan langsung ke lapangan. Sehingga dalam proses penelitiannya, penulis memperoleh data-data dari studi literatur dan sumber-sumber internet. Data-data yang didapatkan tersebut akan diperoleh dari sumber yang relevan dan kredibel untuk mengkaji fenomena mundurnya India dari negosiasi RCEP.

### **1.8.3. *Subjek penelitian***

Objek dalam penelitian ini yaitu *foreign policy* mundurnya India dari negosiasi RCEP. Dalam pengambilan kebijakan tersebut, terdapat subjek yang

berperan sebagai aktor kunci yaitu pemerintah India, khususnya pada era pemerintahan Narendra Modi, serta kementerian dan lembaga di India yang terkait. Selain itu, *stakeholders* tertentu seperti masyarakat sipil, pelaku bisnis, dan NGO tertentu juga turut menjadi subjek yang memberikan tekanan domestik atas kontradiksi bergabungnya India ke dalam forum RCEP. Subjek-subjek tersebut lah yang memegang teguh nilai *Swadeshi* sehingga memengaruhi kemunduran India dari negosiasi RCEP.

#### **1.8.4. Jenis data**

Walaupun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tetapi jenis data yang disajikan akan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat non-numerik, dan data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik. Mengingat tema dari penelitian ini adalah mengenai ekonomi politik internasional, data kuantitatif akan sangat dibutuhkan untuk menunjang data kualitatif yang ada. Sehingga penelitian ini akan mengandung data yang akurat, bervariasi, dan komprehensif.

#### **1.8.5. Sumber data**

Berdasarkan sumbernya, penulis sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diambil secara tidak langsung dari tangan kedua. Misalnya, data-data yang diambil berasal dari buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dokumen resmi, *report*, situs-situs di internet, dan lain sebagainya (BAKAI Universitas Medan Area, 2022). Dalam penelitian ini, penulis akan menghimpun dan mengakumulasi seluruh data-data dari sumber sekunder, mulai dari buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dokumen resmi, *report*, data set, dan situs-situs di internet.

#### ***1.8.6. Teknik pengumpulan data***

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi dan studi literatur. Menurut Sugiyono (2017), studi dokumentasi adalah pengumpulan data melalui buku, dokumen, arsip, gambar, dan tulisan angka yang memberikan keterangan yang dapat mendukung penelitian. Melalui dokumentasi, penulis dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian yang mendukung hipotesis mereka. Sehingga penulis tidak perlu melakukan wawancara atau observasi dalam pengumpulan data. Sementara studi literatur menurut Danial dan Warsiah (2009) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai jenis literatur seperti buku, majalah, artikel jurnal, dan lain sebagainya demi menunjang penelitian. Studi literatur bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai teori yang relevan untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti (Afra, 2023).

#### ***1.8.7. Analisis dan interpretasi data***

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dan interpretasi data dari Geoffrey E. Mills (2000) yang terdiri dari beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi ide-ide dari data yang dihimpun secara induktif dari ide yang general ke yang lebih spesifik. Kedua, setiap ide atau kelompok data dapat diberikan kode. Ketiga, mencari jawaban dari setiap pertanyaan kunci dari 5W1H. Keempat, membuat gambaran umum tentang unsur yang diteliti seperti latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya. Kelima, membuat pemetaan faktor-faktor yang melatarbelakangi suatu fenomena secara visual. Keenam, menyajikan hasil temuan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Terakhir, mengemukakan

kekurangan dalam penelitian berdasarkan apa yang belum dapat ditemukan (Mills, 2018:179-189).

Interpretasi data pada penelitian ini pun dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, mengajukan pertanyaan atas *research gap* dari penelitian terdahulu. Kedua, mencari relevansi dengan ide-ide dari pengalaman pribadi atau yang sudah pernah dipelajari. Ketiga, memberikan pandangan kritis dari hasil analisis. Keempat, mencari relevansi antara hasil analisis dengan teori-teori yang sekiranya relevan untuk mengupas fenomena. Kelima, mengkaji hubungan dari fenomena dan teori yang relevan (Mills, 2018:203-207).

#### **1.8.8. Kualitas data (*goodness criteria*)**

Untuk menjamin kualitas data dari penelitian ini, penulis akan menggunakan kriteria kredibilitas dari Lincoln dan Guba (1985) yang mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas. Dalam menjaga kredibilitas, penulis akan menjamin relevansi antara data-data yang dihimpun dengan gambaran penelitian. Penulis juga akan menjamin transferabilitas agar penelitian ini mampu diterapkan dalam konteks atau studi kasus lain. Dependabilitas akan dijamin agar temuan penelitian tetap relevan dari waktu ke waktu. Terakhir, konfirmabilitas juga akan dijamin agar temuan penelitian dapat dikonfirmasi atau diverifikasi oleh peneliti atau pihak lain yang lebih terampil di bidang ini (Lincoln & Guba, 1985).

### **1.9. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab terstruktur sebagai berikut.

1. *BAB I PENDAHULUAN*

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, dan metode penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

2. *BAB II MUNDURNYA INDIA DARI NEGOSIASI RCEP, STRATEGI EKONOMI POLITIK INDIA ERA KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI, HINGGA POLITISASI SWADESHI*

Bab ini memuat gambaran umum mengenai praktik *Swadeshi* pada era kolonialisme Inggris dan setelah reformasi ekonomi 1991. Selain itu, dipaparkan pula gambaran strategi ekonomi politik Narendra Modi hingga gambaran proses mundurnya India dari negosiasi RCEP.

3. *BAB III SWADESHI DALAM STRATEGI EKONOMI POLITIK NARENDRA MODI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN MUNDURNYA INDIA DARI NEGOSIASI RCEP*

Dengan menggunakan kerangka pemikiran *Strategic Culture*, serta metode Pemetaan Kognitif dan Analisis Simbol, bagian ini akan menjelaskan bagaimana *Swadeshi* memengaruhi strategi ekonomi politik Narendra Modi hingga India memutuskan untuk mengundurkan diri dari negosiasi RCEP.

4. *BAB IV PENUTUP*

Bab ini akan menyimpulkan keseluruhan dari hasil penelitian, serta saran dari penulis untuk dikembangkan di penelitian selanjutnya.